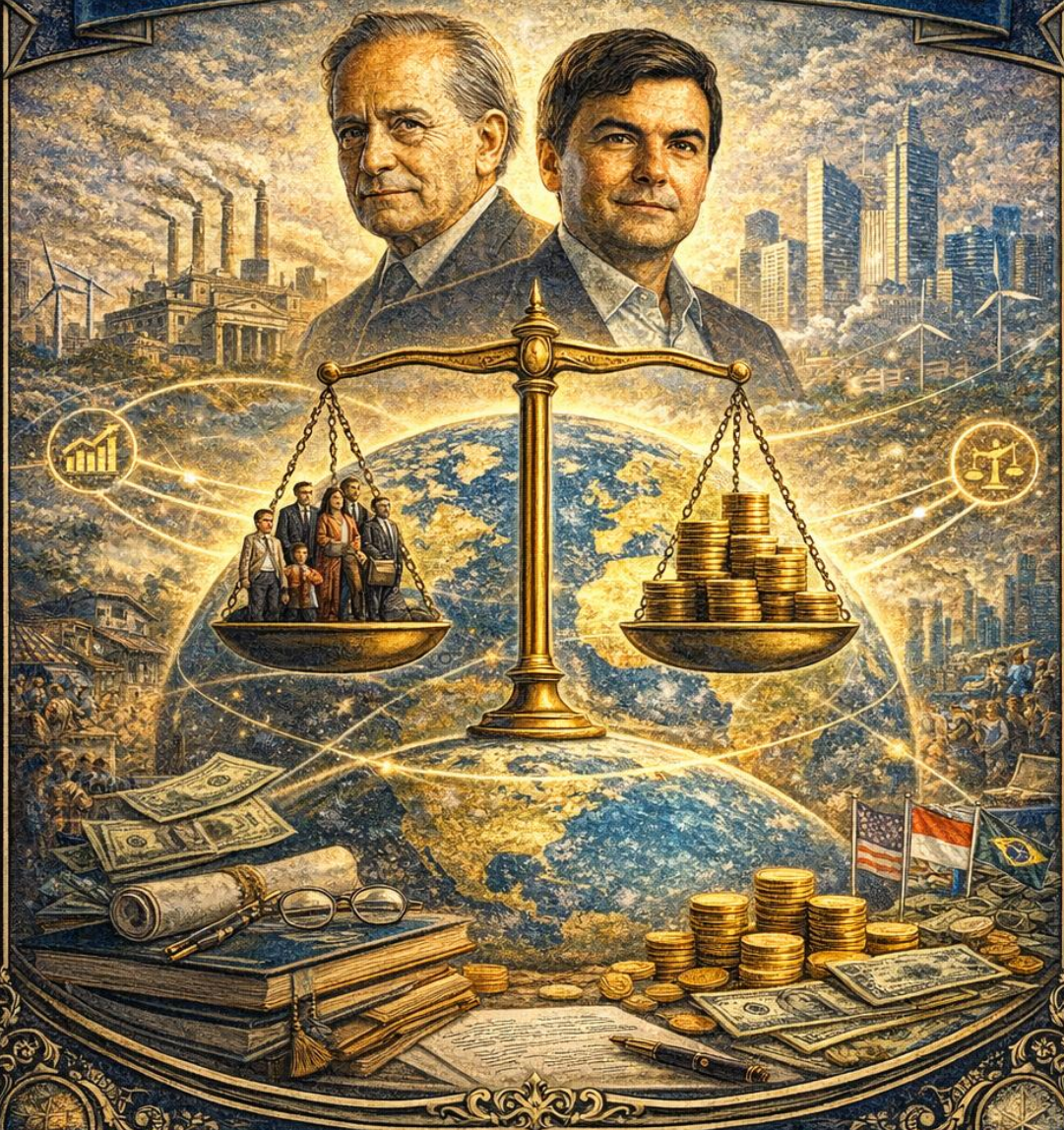


Dari Karl Polanyi ke Piketty

Membaca Ulang Relasi Pasar dan Keadilan Dunia



Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Dari Karl Polanyi ke Piketty: Membaca Ulang
Relasi Pasar dan Keadilan Dunia*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

14 April 2026

DARI KARL POLANYI KE PIKETTY: MEMBACA ULANG RELASI PASAR DAN KEADILAN DUNIA

Abstrak

Makalah ini membahas ulang relasi antara pasar dan keadilan dunia dengan menempatkan Karl Polanyi dan Thomas Piketty sebagai dua simpul pemikiran yang saling melengkapi. Polanyi mengingatkan bahwa pasar tidak pernah benar-benar otonom dari masyarakat; upaya membangun pasar yang mengatur diri sendiri justru cenderung merusak jaringan sosial yang menopangnya. Piketty, di sisi lain, menunjukkan bahwa ketimpangan bukan anomali sementara, melainkan hasil historis dari dinamika akumulasi kapital, perbedaan tingkat pengembalian aset, *elite capture*, dan kelemahan institusi penyeimbang. Dibaca bersama, keduanya memberi dasar teoritis yang kuat untuk menafsirkan ulang ekonomi global dewasa ini: pasar memang produktif, tetapi tanpa institusi sosial, politik, dan fiskal yang kuat, pasar akan cenderung memusatkan kekayaan, memperlebar jarak sosial, dan melemahkan legitimasi demokrasi. Polanyi membantu kita memahami mengapa masyarakat selalu melahirkan gerak perlindungan terhadap pasar, sedangkan Piketty membantu menjelaskan mengapa perlindungan itu harus diwujudkan dalam bentuk konkret seperti pajak progresif, layanan publik, hak buruh, dan demokratisasi pendidikan. ([Economic Sociology & Political Economy](#))

Makalah ini juga menempatkan dialog Polanyi–Piketty dalam konteks mutakhir krisis ketimpangan global. Data terbaru menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan global melambat hampir sampai titik diam; hampir setengah populasi dunia masih hidup di bawah ambang US\$6,85

per hari; pembangunan manusia global mengalami kenaikan terlemah sejak 1990 di luar tahun-tahun krisis; *jobs gap* global mencapai sekitar 402 juta orang pada 2024; dan ketimpangan kesejahteraan lintas gender, usia, pendidikan, serta akses digital tetap mendalam. Dalam konteks inilah pembacaan ulang atas pasar dan keadilan menjadi mendesak. Pasar perlu dibaca kembali bukan sebagai hukum alam, melainkan sebagai institusi historis yang harus diatur agar melayani manusia. Keadilan dunia, karena itu, tidak cukup dipahami sebagai pertumbuhan rata-rata, tetapi harus dimaknai sebagai perluasan kapabilitas, penurunan eksklusivitas, dan pembentukan institusi global yang lebih adil. ([World Bank](#))

Kata kunci: *Karl Polanyi, Thomas Piketty, pasar, keadilan dunia, ketimpangan global, kapital, embeddedness, double movement, redistribusi, globalisasi*

Dari Karl Polanyi ke Piketty: Membaca Ulang Relasi Pasar dan Keadilan Dunia

1. Pendahuluan

Salah satu pertanyaan terbesar dalam ekonomi politik modern adalah apakah pasar dapat dibiarkan menjadi prinsip pengorganisasi utama masyarakat. Selama abad ke-19 hingga abad ke-21, jawaban dominan sering cenderung afirmatif: semakin luas pasar, semakin besar efisiensi; semakin kecil hambatan, semakin tinggi kemakmuran. Namun sejarah ekonomi dan data sosial kontemporer memperlihatkan bahwa relasi antara pasar dan kesejahteraan jauh lebih rumit. WTO menegaskan bahwa perdagangan dan keterbukaan pasar memang telah membantu menciptakan konvergensi pendapatan antarnegeri dan memperbaiki kondisi hidup jutaan orang. Akan tetapi, WTO juga menegaskan bahwa

manfaat tersebut tidak dibagikan secara setara kepada semua individu, wilayah, dan ekonomi. Artinya, keberhasilan pasar sebagai mekanisme koordinasi tidak secara otomatis menjadikannya adil sebagai tatanan sosial. ([World Bank](#))

Dalam lanskap seperti itu, Karl Polanyi dan Thomas Piketty menjadi sangat relevan. Polanyi adalah salah satu pengkritik paling tajam terhadap mitos pasar yang mengatur diri sendiri. Ia melihat pasar modern bukan sebagai evolusi alami, melainkan sebagai konstruksi historis dan politik yang memisahkan ekonomi dari jejaring sosial. Piketty, hampir satu abad kemudian, menunjukkan bahwa kapitalisme modern secara sistematis cenderung memproduksi konsentrasi kekayaan kecuali jika dilawan oleh institusi penyeimbang yang kuat. Jika Polanyi menjelaskan bagaimana masyarakat bereaksi ketika pasar terlalu dominan, maka Piketty menjelaskan mengapa reaksi itu harus menjelma menjadi kebijakan redistributif dan institusi publik yang kokoh. ([Encyclopedia Britannica](#))

Urgensi pembacaan ulang ini semakin jelas ketika kita melihat situasi dunia saat ini. World Bank melaporkan bahwa pengurangan kemiskinan global dan peningkatan *shared prosperity* telah melambat hampir sampai titik diam, bahkan menimbulkan kekhawatiran bahwa 2020–2030 dapat menjadi dekade yang hilang bagi kemajuan sosial. IMF, pada saat yang sama, menggambarkan ekonomi dunia sedang berada pada titik kritis dengan pertumbuhan global yang diproyeksikan turun menjadi 2,8 persen pada 2025 dan 3,0 persen pada 2026, di tengah ketegangan dagang dan ketidakpastian kebijakan yang tinggi. Di sini terlihat bahwa pasar global bukan hanya menghasilkan peluang, tetapi juga guncangan, ketidakpastian, dan distribusi manfaat yang sangat timpang. ([World Bank](#))

Makalah ini berargumen bahwa dari Polanyi ke Piketty terdapat satu garis merah yang kuat: pasar harus dipahami sebagai institusi yang tertanam dalam masyarakat dan karena itu tunduk pada penilaian keadilan. Relasi pasar dan keadilan dunia perlu dibaca ulang bukan dengan menolak pasar secara total, melainkan dengan menolak absolutisasi pasar. Tesis utama

tulisan ini adalah bahwa ketimpangan global hari ini tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan pertumbuhan, melainkan sebagai konsekuensi dari desain kelembagaan yang menempatkan pasar di atas proteksi sosial, demokrasi fiskal, dan distribusi kekuasaan yang adil. Karena itu, pembacaan ulang atas Polanyi dan Piketty membuka jalan menuju ekonomi global yang lebih berorientasi pada martabat manusia, stabilitas demokrasi, dan keadilan lintas negara. ([Economic Sociology & Political Economy](#))

2. Karl Polanyi: Pasar yang Tercerabut dari Masyarakat

Karl Polanyi terkenal karena kritiknya terhadap gagasan *self-regulating market*. Dalam *The Great Transformation*, ia melihat pasar yang mengatur diri sendiri sebagai matriks utama peradaban abad ke-19. Britannica merangkum bahwa Polanyi menganalisis ekspansi kapitalisme abad ke-18 dan ke-19 sebagai upaya membangun ruang ekonomi yang makin terpisah dari institusi non-ekonomi dan didorong terutama oleh logika maksimalisasi laba. Dalam bahasa Polanyi, masalahnya bukan sekadar adanya pasar, melainkan aspirasi untuk menjadikan pasar sebagai prinsip pengorganisasi seluruh masyarakat. ([Encyclopedia Britannica](#))

Gagasan kunci kedua Polanyi adalah *embeddedness*. Britannica menjelaskan bahwa menurut Polanyi, fungsi ekonomi tidak dapat dipahami terlepas dari dunia sosial tempat ia tertanam. Organisasi ekonomi, institusi, dan perekonomian sebagai keseluruhan merupakan bagian dari struktur sosial dan historis yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi bukanlah ranah murni yang berdiri sendiri; ia selalu dipengaruhi oleh hukum, budaya, keluarga, politik, dan kekuasaan. Perspektif ini sangat penting karena menolak klaim bahwa hasil pasar bisa diperlakukan seolah-olah netral secara sosial. ([Encyclopedia Britannica](#))

Kontribusi Polanyi yang paling terkenal adalah konsep *fictitious commodities*. Dalam teks *The Great Transformation*, ia menegaskan bahwa tenaga kerja, tanah, dan uang adalah unsur esensial industri dan memang harus “diorganisasikan” dalam pasar, tetapi ketiganya “jelas bukan komoditas” dalam arti sesungguhnya karena tidak diproduksi untuk dijual.

Ia lalu menyebut deskripsi tenaga kerja, tanah, dan uang sebagai komoditas sebagai "entirely fictitious," dan memperingatkan bahwa membiarkan mekanisme pasar menjadi satu-satunya pengarah nasib manusia, lingkungan alam, dan daya beli akan berujung pada "demolition of society." Gagasan ini sangat tajam: pasar bisa bekerja, tetapi ia menjadi destruktif ketika hal-hal yang mendasar bagi kehidupan diperlakukan seolah-olah sama dengan barang dagangan biasa. ([Economic Sociology & Political Economy](#))

Dari sinilah lahir konsep *double movement*. Polanyi menulis bahwa masyarakat modern digerakkan oleh dua prinsip yang berlawanan. Yang pertama adalah prinsip liberalisme ekonomi yang bertujuan membangun pasar yang mengatur diri sendiri melalui *laissez-faire* dan perdagangan bebas. Yang kedua adalah prinsip perlindungan sosial yang bertujuan melestarikan manusia, alam, dan organisasi produktif dari efek merusak pasar. Dengan kata lain, ketika pasar meluas terlalu jauh, masyarakat akan menghasilkan gerak balasan berupa regulasi, perlindungan, hak buruh, tarif, atau kebijakan sosial lain. Ini bukan anomali, melainkan respons historis yang dapat dipahami secara sistematis. ([Economic Sociology & Political Economy](#))

Yang membuat Polanyi sangat relevan hari ini adalah kenyataan bahwa dunia kita kembali menghadapi fase serupa: deregulasi, finansialisasi, digitalisasi, dan globalisasi menekan institusi sosial yang lebih lambat beradaptasi. Buruh platform, krisis perumahan, volatilitas pangan, krisis iklim, dan privatisasi risiko ekonomi dapat dibaca sebagai bentuk baru dari masalah yang telah didiagnosis Polanyi. Ketika tenaga kerja diperlakukan semata sebagai biaya yang fleksibel, tanah sebagai aset spekulatif, dan uang sebagai komoditas yang terus beredar untuk tujuan finansial, masyarakat akan kembali mencari perlindungan. Dengan demikian, Polanyi membantu kita memahami bahwa konflik antara pasar dan keadilan bukan penyimpangan dari modernitas, melainkan salah satu dinamika utamanya. ([Economic Sociology & Political Economy](#))

3. Thomas Piketty: Ketimpangan, Kapital, dan Institusi Penyeimbang

Jika Polanyi menjelaskan bagaimana pasar yang terlalu otonom mengancam tatanan sosial, Piketty menjelaskan bagaimana kapitalisme modern menghasilkan ketimpangan yang persisten. Dalam tulisan reflektifnya tahun 2025, Piketty menegaskan bahwa sejarah menuju kesetaraan memang ada, tetapi ia sama sekali tidak linear. Ia menulis bahwa sejarah tersebut selalu dipenuhi revolusi, perjuangan sosial, fase regresi, dan mekanisme-mekanisme penghasil ketimpangan seperti $r > g$ dan *elite capture*, yang hanya dapat dikalahkan oleh institusi penyeimbang yang sama kuatnya. Ini adalah koreksi penting terhadap pandangan bahwa modernisasi ekonomi dengan sendirinya akan membawa distribusi yang lebih adil. ([WID - World Inequality Database](#))

Dalam bingkai Piketty, $r > g$ bukanlah slogan tunggal, melainkan penanda kecenderungan dasar bahwa ketika tingkat pengembalian atas modal secara sistematis lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, kekayaan cenderung terkonsentrasi. Dalam refleksinya sepuluh tahun setelah *Capital in the Twenty-First Century*, Piketty juga menekankan bahwa $r > g$ perlu diperbesar oleh faktor lain—termasuk perbedaan tingkat tabungan dan perbedaan tingkat pengembalian antara yang kaya dan yang miskin—untuk menjelaskan ketimpangan kekayaan yang besar. Artinya, ketimpangan bukan hasil dari satu hukum mekanis, melainkan hasil gabungan dari dinamika kapital, warisan, akses atas aset, dan institusi yang mengaturnya. ([WID - World Inequality Database](#))

Poin penting lain dari Piketty adalah bahwa kemajuan menuju persamaan dalam abad ke-20 bukanlah hadiah otomatis dari pasar. Ia menulis bahwa transformasi besar menuju masyarakat yang lebih setara dicapai melalui perjuangan sosial dan mobilisasi kolektif yang memaksa hadirnya layanan publik, demokratisasi pendidikan, asuransi kesehatan universal, perpajakan progresif, dan hak-hak buruh. Dengan demikian, Piketty tidak sekadar menyajikan statistik ketimpangan; ia mengembalikan politik ke pusat ekonomi. Ketimpangan tidak turun karena kapitalisme “matang” dengan

sendirinya, melainkan karena masyarakat memaksakan aturan baru pada kapitalisme. ([WID - World Inequality Database](#))

Yang juga penting, Piketty dalam tulisannya tahun 2025 bergerak melampaui fokus awalnya yang relatif lebih berat pada dunia kaya. Ia menyatakan bahwa karya-karya belakangan memberi peran lebih sentral pada relasi Utara–Selatan, pada ketimpangan kekuasaan dan status, serta pada sejarah global dari rezim ketimpangan. Dalam arti ini, Piketty menjadi semakin relevan untuk membaca keadilan dunia, bukan hanya ketidaksetaraan domestik di Eropa dan Amerika Serikat. Ia menghubungkan pembicaraan tentang kekayaan, pajak, dan institusi dengan agenda keadilan iklim, reformasi moneter internasional, dan peran Global South dalam membentuk masa depan. ([WID - World Inequality Database](#))

Piketty juga menandai adanya pergeseran diskursus global. Ia mencatat bahwa usulan pajak kekayaan global atas miliarder yang pada 2014 dianggap utopis telah menjadi bagian dari pembicaraan arus utama dan dibahas di G20 pada 2024. Ia mengaitkan hal ini dengan sejarah bahwa tarif pajak penghasilan sangat progresif—bahkan mencapai 80–90 persen pada beberapa ekonomi besar—pernah diterapkan dan berkontribusi pada penurunan ketimpangan serta pertumbuhan produktivitas yang kuat. Dengan demikian, Piketty bukan hanya teoritikus ketimpangan, tetapi juga pengingat bahwa kebijakan yang hari ini tampak “radikal” sering kali sebenarnya memiliki preseden historis yang kuat. ([WID - World Inequality Database](#))

4. Dari Polanyi ke Piketty: Menyatukan Kritik Pasar dan Kritik Ketimpangan

Membaca Polanyi dan Piketty bersama memberi kita sintesis yang kaya. Polanyi mengingatkan bahwa pasar yang terlalu dibiarkan merembes ke seluruh sendi kehidupan akan memicu kerusakan sosial dan gerak perlindungan. Piketty menunjukkan bahwa tanpa institusi penyeimbang yang kuat, akumulasi kapital akan secara sistematis memperbesar

kesenjangan. Polanyi menjelaskan mengapa masyarakat menolak absolutisasi pasar; Piketty menjelaskan instrumen apa yang dibutuhkan untuk membuat penolakan itu efektif secara distributif. ([Economic Sociology & Political Economy](#))

Dari Polanyi kita mendapatkan bahasa tentang *embeddedness*, *fictitious commodities*, dan *double movement*. Dari Piketty kita mendapatkan bahasa tentang distribusi, akumulasi modal, pajak progresif, dan koalisi redistributif. Keduanya sama-sama menolak gagasan bahwa hasil pasar mencerminkan tatanan moral yang netral. Keduanya juga sama-sama menolak cara pandang fatalistik terhadap ketimpangan. Bila Polanyi berkata bahwa masyarakat secara realistis akan melindungi dirinya dari pasar yang utopis, maka Piketty menambahkan bahwa perlindungan itu harus dilembagakan dalam bentuk konkret: pendidikan publik, kesehatan universal, hak buruh, dan reformasi pajak. ([Economic Sociology & Political Economy](#))

Persamaan lain yang penting ialah bahwa keduanya melihat sejarah sebagai arena konflik, bukan evolusi harmonis. Polanyi menunjukkan bahwa *laissez-faire* sendiri sebenarnya dibangun melalui intervensi negara yang kuat dan tidak pernah hadir sebagai perkembangan alami. Piketty pun menekankan bahwa kemajuan menuju kesetaraan terjadi melalui revolusi, perjuangan sosial, dan institusi tandingan terhadap mekanisme ketimpangan. Jadi, pasar bukan ruang yang "alamiah" dan keadilan bukan bonus yang datang belakangan; keduanya selalu dinegosiasikan secara politik. ([Economic Sociology & Political Economy](#))

Namun ada juga perbedaan penekanan. Polanyi lebih banyak bergerak pada level institusional-historis: bagaimana masyarakat pasar lahir dan mengapa ia rapuh secara sosial. Piketty bergerak lebih kuantitatif dan distributif: bagaimana pendapatan dan kekayaan terkonsentrasi, dan instrumen apa yang bisa mengoreksinya. Perbedaan ini justru produktif. Polanyi membantu kita memahami struktur besar dari masalah; Piketty membantu kita merancang alat kebijakannya. Dibaca bersama, keduanya

menawarkan jembatan antara kritik filosofis atas pasar dan desain ekonomi politik yang lebih konkret. ([Encyclopedia Britannica](#))

5. Dunia Kontemporer: Mengapa Relasi Pasar dan Keadilan Harus Dibaca Ulang

Krisis ketimpangan global hari ini membuat dialog Polanyi–Piketty terasa mendesak. World Bank melaporkan bahwa kemajuan pengurangan kemiskinan global dan peningkatan kemakmuran bersama telah melambat hampir sampai titik diam. Sekitar 3,5 miliar orang hidup dengan kurang dari US\$6,85 per hari, hampir 700 juta orang berada dalam kemiskinan ekstrem, dan rata-rata pendapatan dunia harus meningkat sekitar lima kali lipat untuk mencapai standar kemakmuran US\$25 per orang per hari. Ini adalah indikator bahwa dunia belum hanya tertinggal dalam pertumbuhan, tetapi juga dalam distribusi hasil pertumbuhan.

UNDP menambahkan dimensi lain yang sama mengkhawatirkannya. Laporan 2025 menyebut bahwa di luar tahun-tahun krisis pandemi, kenaikan pembangunan manusia yang diproyeksikan untuk 2024 adalah yang paling kecil sejak 1990, dan bahwa seluruh kawasan dunia mengalami stagnasi relatif dalam indeks pembangunan manusia. Hal ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa akumulasi output ekonomi tidak otomatis mengalir ke kualitas hidup yang lebih baik. Bila kehidupan manusia stagnan dalam kesehatan, pendidikan, dan pilihan hidup, maka pasar global harus dipertanyakan bukan karena gagal total, tetapi karena keberhasilannya sangat parsial. ([UNDP](#))

Di pasar kerja, gambarnya juga serupa. ILO memperkirakan *jobs gap* global mencapai sekitar 402,4 juta orang pada 2024. Angka ini mencakup sekitar 186 juta penganggur, 137 juta orang dalam *potential labour force*—terutama pekerja yang putus asa—dan sekitar 79 juta orang yang sementara tidak tersedia untuk bekerja. Dengan kata lain, jutaan orang hidup di tepi pasar kerja: mereka ingin bekerja, tetapi tidak menemukan pintu masuk yang layak. Dalam kerangka Polanyi, kondisi ini menunjukkan betapa rapuhnya ketika tenaga kerja diperlakukan murni sebagai

komoditas. Dalam kerangka Piketty, ini menunjukkan lemahnya institusi yang seharusnya menyeimbangkan distribusi pendapatan dan kesempatan. (ilo.org)

OECD pun menunjukkan bahwa ketimpangan tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai soal pendapatan. *How's Life? 2024* mengembangkan lebih dari 80 indikator dan menemukan bahwa ketimpangan kesejahteraan lintas gender, usia, dan pendidikan tetap sangat besar. Fokus pada rata-rata, kata OECD, dapat menyembunyikan jurang dalam pengalaman hidup manusia. Orang dengan pendidikan tinggi, misalnya, secara sistematis lebih baik pada hampir semua dimensi kesejahteraan, bukan hanya pekerjaan dan pendapatan tetapi juga dimensi non-material seperti rasa sepi, sakit fisik, dan rasa aman. Ini penting bagi pembacaan Polanyi–Piketty karena menunjukkan bahwa pasar menciptakan hierarki yang jauh lebih luas daripada sekadar distribusi uang. ([OECD](http://oecd.org))

Relasi pasar dan keadilan juga makin rumit di era digital. ITU melaporkan bahwa internet terus tumbuh, tetapi universalitasnya tetap sulit dicapai, terutama di kawasan berpendapatan rendah. Masih ada 189 juta lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang menggunakan internet pada 2024, dengan tingkat penggunaan 70 persen pada laki-laki dan 65 persen pada perempuan. Bila akses digital kini menjadi prasyarat untuk pendidikan, pekerjaan, pembiayaan, dan partisipasi sipil, maka kesenjangan digital adalah bentuk baru dari eksklusi ekonomi. Dari kacamata Polanyi, ini memperluas daftar “komodifikasi” terhadap syarat-syarat hidup; dari kacamata Piketty, ini memperlihatkan bagaimana aset baru—data, jaringan, platform—juga berpotensi terkonsentrasi secara tidak setara. ([ITU](http://itu.org))

Sementara itu, IMF menandai bahwa ekonomi global memasuki periode pertumbuhan yang lebih lemah dan risiko yang lebih tinggi, dipicu oleh eskalasi ketegangan dagang dan ketidakpastian kebijakan. Ketika pertumbuhan melambat dan biaya hidup menekan rumah tangga, ketimpangan distribusi menjadi semakin politis. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan tentang bagaimana pasar harus diatur agar tetap sah secara

sosial tidak lagi bersifat teoritis, melainkan menjadi inti dari stabilitas demokrasi dan perdamaian sosial. ([IMF](#))

6. Membaca Ulang Keadilan Dunia

Relasi pasar dan keadilan dunia hari ini tidak lagi bisa dibingkai hanya sebagai perdebatan antara "pasar" versus "negara." Yang lebih relevan adalah bagaimana institusi domestik dan global membagi risiko, manfaat, dan kekuasaan. World Bank menyatakan bahwa penghapusan kemiskinan dan peningkatan *shared prosperity* di planet yang layak huni memerlukan kerja sama internasional, penutupan kesenjangan pembiayaan pembangunan, dan upaya mengelola trade-off antara pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, dan keberlanjutan. Pesan ini sangat Polanyian karena menolak ide bahwa pasar dunia cukup dibiarkan berjalan sendiri; sekaligus sangat Pikettyan karena menyiratkan kebutuhan akan institusi kolektif dan pembiayaan yang lebih adil. ([World Bank](#))

Membaca ulang keadilan dunia berarti pertama-tama mengakui bahwa pasar global tidak netral. Ia dibangun di atas aturan perdagangan, sistem moneter, rezim perpajakan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan mobilitas modal yang semuanya merupakan hasil keputusan politik. Karena itu, ketimpangan global bukan semata akibat "nasib" geografis atau kultur kerja, tetapi juga hasil dari desain institusional internasional. Piketty dalam refleksinya menekankan bahwa diskusi masa depan mengenai keadilan global akan menyentuh reformasi sistem moneter dan keuangan internasional yang secara historis lebih menguntungkan negara kaya daripada negara berkembang. Ini berarti persoalan keadilan dunia harus digeser dari moralitas karitatif menuju reformasi struktur. ([WID - World Inequality Database](#))

Kedua, membaca ulang keadilan dunia berarti menolak pengukuran yang semata berbasis PDB. OECD menunjukkan bahwa pendekatan kesejahteraan multidimensi lebih mampu menangkap kehidupan nyata manusia daripada statistik output semata. Jika sebuah negara tumbuh cepat tetapi warganya makin tercekik biaya hidup, akses pendidikan tetap

timpang, dan keamanan sosial rapuh, maka keberhasilan itu bersifat parsial. Dalam konteks Polanyi, PDB dapat menjadi ukuran masyarakat pasar, tetapi tidak cukup menjadi ukuran masyarakat yang adil. Dalam konteks Piketty, statistik rata-rata tanpa distribusi dapat menyembunyikan naiknya konsentrasi kekayaan pada lapisan sangat atas. ([OECD](#))

Ketiga, membaca ulang keadilan dunia berarti mengembalikan konflik sosial ke pusat analisis. Piketty sangat jelas bahwa kemajuan menuju kesetaraan bukan hasil otomatis dari pasar, melainkan buah dari perjuangan kolektif dan institusi tandingan. Polanyi juga jelas bahwa gerak perlindungan sosial lahir sebagai respons terhadap ekspansi pasar. Maka, ketika hari ini kita berbicara tentang pajak kekayaan, hak pekerja platform, pembiayaan iklim, pendidikan publik, dan perlindungan sosial universal, kita tidak sedang berbicara tentang gangguan terhadap pasar, melainkan tentang syarat agar pasar tetap dapat diterima secara sosial. ([WID - World Inequality Database](#))

7. Agenda Kebijakan: Dari Kritik ke Rekonstruksi

Jika Polanyi dan Piketty dibaca sebagai panduan praktis, maka ada beberapa agenda kebijakan besar yang tampak jelas. Pertama, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik dasar harus diposisikan sebagai institusi anti-eksklusi. Piketty secara eksplisit menempatkan demokratisasi pendidikan, asuransi kesehatan universal, dan layanan publik sebagai unsur utama dari penurunan ketimpangan historis. Ini sejalan dengan pelajaran OECD bahwa latar pendidikan berkorelasi kuat dengan hampir seluruh dimensi kesejahteraan. Artinya, keadilan dunia harus dimulai dari investasi besar pada kapabilitas manusia, bukan dari harapan bahwa pasar akan menyediakannya secara spontan. ([WID - World Inequality Database](#))

Kedua, hak-hak buruh dan kualitas pekerjaan harus dikembalikan ke pusat kebijakan pembangunan. ILO menunjukkan besarnya *jobs gap*, sementara Piketty menekankan pentingnya hak buruh sebagai bagian dari institusi penyeimbang yang menurunkan ketimpangan. Dalam bahasa Polanyi, tenaga kerja tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas biasa tanpa

merusak manusia yang membawanya. Karena itu, kebijakan pekerjaan tidak boleh berhenti pada penciptaan jumlah pekerjaan, tetapi harus menyangkut upah layak, keamanan kerja, pelatihan ulang, dan perlindungan bagi pekerja informal serta platform. (ilo.org)

Ketiga, perpajakan progresif dan pembiayaan publik harus dipulihkan sebagai instrumen utama keadilan. Piketty secara konsisten menegaskan bahwa redistribusi melalui pajak progresif, termasuk pajak atas kekayaan besar, bukan semata hukuman terhadap keberhasilan ekonomi, tetapi cara demokratis untuk membiayai layanan publik, mengurangi konsentrasi kekuasaan, dan menjaga kohesi sosial. World Inequality Report 2026 juga menyatakan bahwa transfer redistributif, perpajakan progresif, investasi pada modal manusia, dan hak buruh yang lebih kuat telah membuat perbedaan dalam beberapa konteks, dan bahwa minimum wealth tax atas multimiliuner dapat memobilisasi sumber daya bagi pendidikan, kesehatan, dan adaptasi iklim. ([WID - World Inequality Database](https://wid.world/))

Keempat, perlindungan sosial universal harus dianggap sebagai infrastruktur ekonomi, bukan sekadar pos pengeluaran sosial. Walaupun fokus makalah ini adalah Polanyi dan Piketty, data mutakhir memperjelas mengapa isu ini krusial: 2 miliar orang di negara berpendapatan rendah dan menengah masih tidak tercakup atau tercakup tidak memadai oleh perlindungan sosial. Dalam kerangka Polanyi, perlindungan sosial adalah bentuk khas dari *countermovement*; dalam kerangka Piketty, ia adalah instrumen konkret untuk mengurangi ketimpangan hasil dan membuka kesempatan bagi kelompok bawah. ([Economic Sociology & Political Economy](https://www.cambridge.org/core))

Kelima, tata kelola global harus dibuat lebih adil. Piketty menyoroti semakin pentingnya Global South dalam agenda keadilan ekonomi dan iklim. World Bank juga menekankan perlunya kerja sama internasional dan penutupan kesenjangan pembiayaan bagi pembangunan berkelanjutan. Ini berarti pasar dunia perlu ditata ulang dalam isu perpajakan lintas negara, utang, pembiayaan iklim, teknologi, dan aturan perdagangan. Tanpa

perubahan di level global, kebijakan domestik progresif akan terus terbentur oleh arsitektur internasional yang berat sebelah. ([WID - World Inequality Database](#))

8. Penutup

Dari Karl Polanyi ke Piketty, kita mendapatkan satu pelajaran besar: pasar tidak boleh dibaca sebagai takdir. Ia adalah institusi historis yang diciptakan, diperluas, dan dipertahankan melalui pilihan politik. Karena ia adalah institusi, maka ia juga dapat dikoreksi, dibatasi, dan didesain ulang. Polanyi mengingatkan bahwa pasar yang mengatur diri sendiri adalah utopia yang merusak, terutama ketika tenaga kerja, tanah, dan uang diperlakukan sebagai komoditas biasa. Piketty mengingatkan bahwa ketimpangan yang lahir dari kapitalisme modern hanya dapat ditahan oleh institusi penyeimbang yang kuat: layanan publik, pendidikan massal, hak buruh, dan perpajakan progresif. ([Economic Sociology & Political Economy](#))

Dalam dunia kontemporer yang ditandai oleh stagnasi pengurangan kemiskinan, perlambatan pembangunan manusia, *jobs gap* ratusan juta orang, ketimpangan kesejahteraan yang dalam, serta kesenjangan digital yang persisten, pembacaan ulang atas relasi pasar dan keadilan bukan lagi pekerjaan akademik yang mewah. Ia adalah kebutuhan intelektual dan politik. Pasar tetap penting, tetapi keadilan harus menjadi kerangka yang menilai dan mengarahkannya. Dunia yang adil bukan dunia tanpa pasar, melainkan dunia di mana pasar tertanam kembali dalam masyarakat, ditundukkan pada martabat manusia, dan dilengkapi dengan institusi yang mencegah kekayaan serta kekuasaan menumpuk tanpa batas.

Akhirnya, membaca ulang Polanyi dan Piketty berarti juga membaca ulang masa depan. Jika abad ke-19 dan ke-20 mengajarkan bahwa pasar yang terlalu dominan memicu perlindungan sosial, maka abad ke-21 menuntut bentuk perlindungan yang lebih luas: tidak hanya bagi buruh pabrik, tetapi juga bagi pekerja platform; tidak hanya bagi warga negara industri, tetapi juga bagi Global South; tidak hanya terhadap pasar tenaga kerja, tetapi juga terhadap pasar data, pasar karbon, dan pasar keuangan global.

Keadilan dunia, karena itu, tidak lagi bisa dianggap sebagai hasil sampingan pertumbuhan. Ia harus menjadi desain sadar dari tatanan ekonomi global yang baru. ([WID - World Inequality Database](#))

Glosarium

Embeddedness

Gagasan bahwa ekonomi tidak dapat dipahami terpisah dari struktur sosial, institusional, dan historis tempat ia beroperasi. Dalam pemikiran Polanyi, pasar selalu tertanam dalam masyarakat. ([Encyclopedia Britannica](#))

Self-regulating market

Gagasan tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri tanpa perlu koreksi sosial-politik yang kuat. Polanyi menganggapnya sebagai prinsip utopis yang berbahaya bagi masyarakat. ([Economic Sociology & Political Economy](#))

Fictitious commodities

Istilah Polanyi untuk tenaga kerja, tanah, dan uang, yaitu unsur-unsur yang diperlakukan seolah-olah komoditas biasa padahal tidak diproduksi untuk dijual. ([Economic Sociology & Political Economy](#))

Double movement

Konsep Polanyi tentang dua gerak yang saling berlawanan dalam masyarakat modern: ekspansi pasar dan gerak perlindungan sosial terhadap efek merusak pasar. ([Economic Sociology & Political Economy](#))

$r > g$

Rumus populer yang diasosiasikan dengan Piketty, yakni ketika tingkat pengembalian modal lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi, kekayaan cenderung terkonsentrasi. Piketty menekankan bahwa

mekanisme ini bekerja bersama faktor-faktor lain. ([WID - World Inequality Database](#))

Elite capture

Situasi ketika kelompok berkuasa mampu membentuk aturan, kebijakan, atau institusi demi mempertahankan dan memperbesar keuntungan mereka sendiri. Piketty menyebutnya sebagai salah satu mekanisme penghasil ketimpangan. ([WID - World Inequality Database](#))

Shared prosperity

Ukuran World Bank tentang seberapa jauh pertumbuhan ekonomi turut meningkatkan kesejahteraan kelompok bawah distribusi pendapatan. ([World Bank](#))

Jobs gap

Ukuran ILO untuk jumlah orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan, termasuk penganggur, pekerja putus asa, dan mereka yang sementara belum tersedia bekerja. ([ilo.org](#))

Redistribusi

Proses kebijakan yang mengalihkan sumber daya melalui pajak, transfer, layanan publik, atau belanja sosial untuk mengurangi ketimpangan. ([WID - World Inequality Database](#))

Keadilan dunia

Kerangka normatif yang menilai apakah aturan dan hasil ekonomi global mendistribusikan peluang, risiko, dan sumber daya secara lebih adil antarkelompok dan antarnegara.

Referensi (APA 7)

International Labour Organization. (2025). *World employment and social outlook: Trends 2025*. ILO.

International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook: A critical juncture amid policy shifts*. IMF.

International Telecommunication Union. (2024). *Measuring digital development: Facts and figures 2024*. ITU.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *How's life? 2024: Measuring well-being*. OECD Publishing.

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.

Piketty, T. (2020). *Capital and ideology*. Harvard University Press.

Piketty, T. (2022). *A brief history of equality*. Harvard University Press.

Piketty, T. (2025). *Capital in the 21st century, ten years later* (World Inequality Lab Working Paper No. 2025/21). World Inequality Lab.

Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time* (2nd Beacon Paperback ed.). Beacon Press. (Original work published 1944)

United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice—People and possibilities in the age of artificial intelligence*. UNDP.

World Bank. (2024). *Policies for inclusive growth: Strengthening the link between economic growth and equity*. World Bank.

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024: Pathways out of the polycrisis*. World Bank.

World Inequality Lab. (2025). *World inequality report 2026: Executive summary*. WID.world.

World Trade Organization. (2024). *World trade report 2024: Trade and inclusiveness—How to make trade work for all*. WTO.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 14 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69db94ae-3dec-8398-916d-3a7fb8f50b29>